KOMUNIKASI PERSUASIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGATASI PELANGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Fitri Rahmadani Parawangsa
NPP. 33.0922
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: fitriparawangsa@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr.Drs.Udaya Madjid,M.Pd
Email: udayamadjid@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *The high rate of violations of Smoke-Free Areas (Kawasan Tanpa Rokok/KTR) in Gowa Regency indicates a gap between the policy established through Regional Regulation Number 3 of 2017 and the level of public compliance, which remains low. Data from 2019 to 2023 show an increasing trend in violations across various public facilities, indicating that the implementation of the policy has not been optimal.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the persuasive communication employed by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in addressing KTR violations, identify the inhibiting factors, and formulate efforts to improve public compliance.* ***Method:*** *This study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews involving Satpol PP officers and members of the community as informants. The data were analyzed using an interactive model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The theoretical framework used is the persuasive communication theory proposed by Onong Uchjana Effendy, combined with Aristotle's rhetorical approach, which includes ethos, pathos, and logos as the main analytical dimensions.* ***Result:*** *This study found that persuasive communication by Satpol PP has been implemented through the credibility of officers (ethos), a humanistic emotional approach (pathos), and the delivery of fact-based and regulatory information (logos). Although this approach has gradually increased public awareness, its effectiveness remains limited due to low levels of public understanding, a high prevalence of smokers, limited resources, and resistance to regulations.* ***Conclusion:*** *This study concludes that it is necessary to strengthen systematic communication strategies, enhance continuous public education, and promote cross-sector collaboration to encourage sustainable public compliance in achieving the optimal effectiveness of KTR policy implementation.*

Keywords: *Ethos, Logos, Pathos, Persuasive Communication, Smoke-Free Areas*

ABSTRAK

Permasalahan: Tingginya pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Gowa menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 dengan tingkat kepatuhan masyarakat yang masih rendah. Data tahun 2019–2023 memperlihatkan tren peningkatan pelanggaran di berbagai fasilitas publik, yang mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mengatasi pelanggaran KTR, mengidentifikasi faktor penghambat, serta merumuskan upaya dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan melibatkan aparat Satpol PP serta masyarakat sebagai informan. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori komunikasi persuasif Onong Uchjana Effendy dengan pendekatan retorika Aristoteles yang meliputi ethos, pathos, dan logos sebagai dimensi analisis utama. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi persuasif Satpol PP telah diterapkan melalui keteladanan aparat (ethos), pendekatan emosional yang humanis (pathos), serta penyampaian informasi berbasis fakta dan regulasi (logos). Meskipun mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara bertahap, efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya pemahaman masyarakat, tingginya prevalensi perokok, keterbatasan sumber daya, dan resistensi terhadap aturan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan strategi komunikasi yang sistematis, peningkatan edukasi publik secara berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor guna mendorong kepatuhan masyarakat secara berkelanjutan untuk mencapai efektivitas kebijakan KTR secara optimal.

Kata kunci: Ethos Pathos Logos, Kawasan Tanpa Rokok, Komunikasi Persuasif

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rokok telah lama dikenal sebagai salah satu faktor risiko utama yang dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis yang serius, mulai dari kanker, penyakit jantung, stroke, hingga gangguan pernapasan seperti bronchitis dan asma. Efek negatif dari merokok tidak hanya dirasakan oleh perokok itu sendiri, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan bagi orang-orang di sekitarnya melalui paparan asap rokok pasif. Berdasarkan data dari World Health Organization (2025), penggunaan tembakau menyebabkan lebih dari 7 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia, yang mencakup kematian akibat penggunaan tembakau secara langsung serta sekitar 1,6 juta kematian pada non-perokok yang disebabkan oleh paparan asap rokok orang lain. Fakta ini menegaskan bahwa dampak rokok tidak hanya terbatas pada perokok aktif, tetapi juga membahayakan keluarga, rekan kerja, dan masyarakat umum, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lanjut usia yang dapat mengalami gangguan pernapasan, penyakit jantung, hingga komplikasi kesehatan lainnya. Data global menggambarkan bahwa konsumsi rokok merupakan masalah kesehatan publik yang sangat serius dan mendesak untuk ditangani, karena biaya pengobatan penyakit terkait rokok, penurunan produktivitas akibat sakit, dan dampak sosial lainnya menjadikan masalah ini semakin kompleks. Fakta tersebut menunjukkan bahwa isu rokok bukanlah masalah individu semata, melainkan tantangan global yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak peraturan, lembaga kesehatan, hingga masyarakat itu sendiri.

Beban kesehatan akibat rokok di Indonesia tetap menjadi salah satu masalah kesehatan publik yang serius, dengan jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai sekitar 70 juta orang. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (2023), prevalensi merokok pada penduduk usia 15 tahun ke atas mencapai 29,7% yang menunjukkan penurunan dari 33,8% pada tahun 2018, sementara tren perokok pada anak dan remaja menunjukkan perbaikan di mana prevalensi perokok usia 10-18 tahun turun dari 9,1% pada tahun 2018 menjadi 7,4% pada tahun 2023, meskipun tetap menjadi perhatian karena mayoritas perokok muda berada di kelompok usia 15-19 tahun. Untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Gowa, khususnya yang berkaitan dengan perilaku merokok, data karakteristik responden menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Kabupaten Gowa memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah, di mana mayoritas hanya menamatkan Sekolah Dasar (34,7%) dan sebagian lainnya tidak menempuh pendidikan formal (11,6%). Dari segi pekerjaan, sebagian besar subjek penelitian bekerja sebagai petani (43,8%) dan wiraswasta (16,3%) dengan mayoritas berada pada kategori status ekonomi rendah (69,5%). Pola perilaku merokok dalam keluarga menunjukkan kecenderungan yang cukup kuat, di mana 89,4% subjek penelitian berasal dari keluarga dengan ayah dan anak yang sama-sama perokok, sementara berdasarkan kelompok umur, sebagian besar subjek penelitian berada pada kategori dewasa (26-45 tahun) sebesar 89,4% yang umumnya menjadi kelompok usia produktif, dan jenis rokok yang paling banyak dikonsumsi adalah rokok filter (97,3%).

Sebagai bentuk upaya perlindungan masyarakat dari dampak negatif rokok, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau. Undang-undang dan peraturan ini mengatur bahwa sejumlah fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, angkutan umum, dan ruang publik tertentu wajib bebas dari aktivitas merokok, dengan tujuan utama melindungi masyarakat terutama kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, dan perokok pasif dari paparan asap rokok yang berbahaya bagi kesehatan. Kabupaten Gowa telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai salah satu upaya strategis pemerintah daerah menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok, yang mengatur larangan merokok di berbagai fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, kantor pemerintahan, dan ruang publik lainnya. Namun demikian, implementasi KTR di tingkat daerah juga menghadapi tantangan teknis, seperti keterbatasan petugas pengawasan, minimnya fasilitas penunjang, dan resistensi sebagian masyarakat yang belum memahami urgensi peraturan tersebut. Penegakan kebijakan KTR tidak hanya mengandalkan aturan tertulis atau sanksi administrasi semata, tetapi dibutuhkan strategi komunikasi yang efektif, sosialisasi yang menyeluruh, serta pembinaan perilaku sehat agar masyarakat mau mematuhi aturan secara sukarela.

Meski telah diatur secara resmi melalui Perda, implementasi KTR di Kabupaten Gowa menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Berdasarkan data dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gowa tahun 2019-2023, jumlah pelanggaran KTR masih menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu 180 kasus pada tahun 2019, 200 kasus pada tahun 2020, 220 kasus pada tahun 2021, 230 kasus pada tahun 2022, dan 250 kasus pada tahun 2023, dengan lokasi dominan di rumah sakit, kantor pemerintahan, terminal, pasar tradisional, dan ruang pelayanan publik. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut masih

tergolong rendah, dengan faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab meningkatnya pelanggaran antara lain tingginya jumlah perokok di masyarakat, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya asap rokok, serta keterbatasan pengawasan di sejumlah kawasan publik. Rendahnya kepatuhan terhadap kebijakan KTR bukan hanya terjadi di Kabupaten Gowa, melainkan merupakan tantangan yang dihadapi berbagai daerah di Indonesia. Penelitian di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan fasilitas publik terhadap kebijakan KTR hanya sebesar 38%, dengan tantangan utama meliputi lemahnya penegakan hukum dan kurangnya dukungan lintas sektor pemerintah (Yunarman et al., 2020). Fenomena peningkatan pelanggaran ini menunjukkan bahwa keberhasilan peraturan saja tidak cukup untuk menciptakan lingkungan bebas rokok, dan diperlukan upaya yang menyeluruh termasuk strategi komunikasi yang efektif, peningkatan kapasitas petugas pengawasan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan mendukung implementasi KTR. Salah satu pendekatan yang potensial dalam meningkatkan kepatuhan terhadap KTR adalah penerapan komunikasi persuasif oleh Satpol PP, di mana pendekatan ini memungkinkan aparat penegak peraturan daerah untuk tidak sekadar menegakkan aturan secara kaku, tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, memberikan edukasi mengenai dampak negatif rokok, dan mendorong perubahan perilaku secara sukarela (Effendy, 1990). Penelitian mengenai komunikasi persuasif yang diterapkan Satpol PP Kabupaten Gowa menjadi penting untuk dilakukan karena dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pendekatan ini diterapkan, hambatan yang dihadapi aparat di lapangan, serta efektivitas strategi yang digunakan dalam menurunkan angka pelanggaran. Lokus penelitian ini difokuskan pada Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kecamatan Pallangga sebagai area utama implementasi dan pengamatan pelanggaran KTR, dengan memfokuskan pada Kelurahan Parang Banoa yang merupakan pusat aktivitas masyarakat dengan fasilitas publik seperti pasar, sekolah, dan tempat ibadah yang sering menjadi lokasi pelanggaran, serta Desa Taeng yang memiliki karakteristik pedesaan dengan prevalensi merokok yang lebih tinggi di kalangan petani dan pekerja informal.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kesenjangan antara kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan, yang tercermin dari peningkatan jumlah pelanggaran KTR di Kabupaten Gowa dari tahun 2019 hingga 2023. Secara ideal, dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2017 tentang KTR serta berbagai upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah, jumlah pelanggaran seharusnya menurun seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok dan pentingnya lingkungan bebas asap rokok. Namun kenyataannya, data Satpol PP Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap peraturan KTR masih menjadi tantangan yang signifikan, dengan angka pelanggaran yang terus meningkat setiap tahunnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan antara lain tingginya jumlah perokok aktif di masyarakat, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai risiko kesehatan akibat paparan asap rokok, keterbatasan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan, serta pengawasan yang belum optimal akibat keterbatasan jumlah petugas Satpol PP di lapangan. Data karakteristik responden di Kabupaten Gowa memperkuat kesenjangan ini, di mana sebagian besar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah dengan mayoritas hanya menamatkan Sekolah Dasar (34,7%) dan bahkan tidak menempuh pendidikan formal (11,6%), sementara dari segi pekerjaan sebagian besar bekerja sebagai petani

(43,8%) dengan status ekonomi rendah (69,5%), serta pola perilaku merokok dalam keluarga menunjukkan kecenderungan kuat di mana 89,4% subjek penelitian berasal dari keluarga dengan ayah dan anak yang sama-sama perokok, yang semakin memperkuat budaya merokok yang sulit diubah.

Fenomena serupa juga terlihat di beberapa daerah lain. Kota Makassar melalui Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok masih mencatat lebih dari 300 kasus pelanggaran KTR pada tahun 2023 terutama di terminal transportasi dan pasar tradisional. Kabupaten Maros juga menghadapi tantangan serupa di mana pelanggaran banyak terjadi di area perkantoran dan rumah makan meskipun telah dipasang imbauan dan rambu larangan merokok. Sementara itu, Kabupaten Gowa melaporkan bahwa sekitar 35% fasilitas umum yang dipantau oleh Satpol PP belum sepenuhnya steril dari asap rokok. Melalui data dari Kabupaten Maros dan Gowa dapat disimpulkan bahwa fenomena ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Gowa, tetapi juga di beberapa kabupaten dan kota lain di Sulawesi Selatan, yang menunjukkan bahwa masalah kepatuhan KTR merupakan isu yang memerlukan perhatian serius. Permasalahan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi KTR tidak cukup hanya mengandalkan regulasi tertulis, tetapi diperlukan strategi yang lebih holistik meliputi edukasi dan sosialisasi yang berkesinambungan, penguatan pengawasan, dan penerapan sanksi yang konsisten. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian di Qingdao, China yang membuktikan bahwa perbedaan instansi penegak yang bertanggung jawab di setiap jenis fasilitas publik berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan KTR, dengan tingkat kepatuhan rata-rata hanya mencapai 64,7% dari 694 lokasi yang diamati (Hoe et al., 2021). Strategi komunikasi yang efektif harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya patuh karena takut sanksi, tetapi juga memahami pentingnya KTR untuk kesehatan bersama. Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi ini menjadi dasar penting bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Gowa dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi pelanggaran KTR, mengingat pendekatan ini memungkinkan aparat tidak hanya menegakkan aturan secara kaku tetapi juga membangun hubungan baik dengan masyarakat dan mendorong perubahan perilaku secara sukarela.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan gambaran empiris mengenai komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gowa dalam mengatasi pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penegakan kebijakan yang lebih efektif di tengah berbagai tantangan seperti tingginya prevalensi merokok di masyarakat (70 juta perokok aktif di Indonesia), rendahnya tingkat pendidikan masyarakat (34,7% lulus SD dan 11,6% tidak tamat SD), dominasi status ekonomi rendah (69,5%), serta kuatnya budaya merokok dalam keluarga (89,4% berasal dari keluarga dengan ayah dan anak sama-sama perokok).

Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Kabupaten Gowa dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami pola, strategi, serta hambatan komunikasi persuasif yang dilakukan Satpol PP secara faktual di lapangan. Akibatnya, perumusan strategi peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap Perda KTR berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan tidak sesuai dengan kondisi riil di masyarakat yang memiliki karakteristik budaya dan

sosial-ekonomi yang unik. Hal ini berpotensi menyebabkan angka pelanggaran KTR yang terus meningkat setiap tahunnya (dari 180 kasus pada 2019 menjadi 250 kasus pada 2023) tidak dapat ditekan secara signifikan, sehingga tujuan kebijakan KTR untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia, tidak tercapai secara optimal. Lebih jauh lagi, tanpa adanya kajian mendalam tentang komunikasi persuasif, pendekatan penegakan kebijakan akan cenderung mengandalkan tindakan represif yang justru dapat menimbulkan resistensi masyarakat dan memperburuk citra Satpol PP sebagai aparat yang kaku dan tidak humanis.

Penelitian ini juga penting secara keilmuan karena mengisi celah penelitian terdahulu yang masih terbatas pada aspek implementasi kebijakan secara makro, belum secara khusus dan mendalam mengkaji teknik-teknik komunikasi persuasif dengan pendekatan retorika Aristoteles (Ethos, Pathos, Logos) dalam konteks penegakan Perda KTR di Kabupaten Gowa. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pengambil kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk menyusun program pelatihan komunikasi persuasif yang terstruktur bagi aparat Satpol PP, mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan dalam sosialisasi berbasis data kesehatan, serta memperbaiki sarana dan prasarana pendukung seperti papan peringatan KTR yang saat ini masih banyak dalam kondisi rusak dan tidak terawat.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks komunikasi persuasif, implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), maupun peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan peraturan daerah. Penelitian Bahrun (2023) yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Rappocini Kota Makassar" dengan metode deskriptif kualitatif menemukan bahwa implementasi kebijakan KTR di Kecamatan Rappocini belum berjalan optimal karena masih terbatas pada sosialisasi tanpa adanya sanksi tegas, sehingga diperlukan program kerja yang jelas dan petunjuk teknis yang lebih terperinci. Penelitian Husain and Tjenreng (2023) dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan" menggunakan metode kualitatif deskriptif menemukan bahwa implementasi Perda KTR di Kabupaten Gowa telah berjalan namun masih terkendala pada aspek sumber daya, komunikasi, dan struktur birokrasi. Penelitian Karman (2025) dengan judul "Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatasi Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan" menggunakan metode kualitatif menemukan bahwa komunikasi persuasif cukup efektif menurunkan pelanggaran KTR, meskipun penelitian ini berlokasi di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur sehingga memiliki konteks sosial budaya yang berbeda dengan Kabupaten Takalar. Penelitian Nurochmah and Ma'ruf (2025) dengan judul "Strategi Penegakan Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Polisi Pamong Praja" menggunakan metode kualitatif deskriptif menemukan bahwa penegakan KTR efektif dengan pendekatan yang tepat, di mana keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada konsistensi komunikasi dan keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) umumnya dilakukan melalui kombinasi sosialisasi, komunikasi persuasif, dan penindakan oleh Satpol PP, di mana komunikasi persuasif merupakan langkah awal

yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebelum tindakan represif dilakukan. Selain itu, keberhasilan penerapan Perda KTR juga dipengaruhi oleh koordinasi lintas sektor, intensitas sosialisasi, serta strategi penegakan yang tepat. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menitikberatkan pada aspek implementasi kebijakan atau strategi penegakan secara umum, belum secara khusus dan mendalam mengkaji teknik-teknik komunikasi persuasif yang diterapkan oleh Satpol PP dalam konteks penegakan Perda KTR di Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah atau research gap tersebut dengan fokus khusus pada komunikasi persuasif Satpol PP Kabupaten Gowa dalam penegakan Perda KTR, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran lebih komprehensif mengenai bagaimana pendekatan persuasif dapat meningkatkan efektivitas penegakan aturan dan mengurangi pelanggaran KTR.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengkaji komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Gowa dengan karakteristik masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan relatif rendah (34,7% lulus Sekolah Dasar dan 11,6% tidak menempuh pendidikan formal), status ekonomi dominan rendah (69,5%), serta pola perilaku merokok dalam keluarga yang kuat (89,4% berasal dari keluarga dengan ayah dan anak sama-sama perokok). Penelitian ini juga berbeda karena tidak hanya mengidentifikasi strategi komunikasi persuasif secara umum, tetapi juga secara simultan menganalisis faktor-faktor penghambat spesifik di lapangan seperti resistensi budaya merokok yang sudah mengakar, keterbatasan jumlah petugas Satpol PP, serta rendahnya kesadaran masyarakat akibat keterbatasan akses informasi, sekaligus mengkaji upaya-upaya konkret yang dilakukan aparat untuk mengatasi hambatan tersebut, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan holistik. Selain itu, fokus penelitian ini di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan berbeda dengan penelitian Karman (2025) yang berlokasi di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, sehingga memiliki konteks sosial budaya masyarakat Bugis-Makassar yang berbeda. Penelitian ini secara eksplisit menggunakan indikator komunikasi persuasif berupa keteladanan aparat, daya tarik emosional, dan penggunaan argumen logis yang belum diukur secara detail oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung membahas implementasi kebijakan secara makro atau strategi penegakan secara umum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan ilmu komunikasi pemerintahan khususnya terkait interaksi antara aparat penegak peraturan daerah dan masyarakat dalam konteks pengendalian perilaku publik yang berisiko bagi kesehatan.

1.6. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa dalam mengatasi hambatan komunikasi persuasif guna meningkatkan efektivitas penegakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena berfokus pada upaya menggambarkan secara mendalam bentuk, strategi, serta efektivitas komunikasi persuasif yang

diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gowa dalam menegakkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa penelitian kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami secara menyeluruh konteks sosial, nilai, dan makna yang melatarbelakangi tindakan para pelaksana kebijakan di lapangan, sehingga peneliti dapat menelusuri dinamika komunikasi yang terjadi antara Satpol PP dan masyarakat termasuk hambatan serta strategi persuasi yang digunakan dalam menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya penerapan KTR (Creswell et al., 2023).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Penggunaan metode observasi lapangan ini relevan dan telah terbukti efektif dalam penelitian kepatuhan KTR di berbagai negara berkembang, di mana pengamatan langsung di fasilitas publik mampu mengungkap kondisi faktual yang tidak terungkap melalui data administratif semata (Chowdhury et al., 2023). Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling, dengan rincian informan terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Gowa, anggota Satpol PP selaku petugas lapangan, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, serta dua orang masyarakat atau pelanggar KTR. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles et al. (2014) yang meliputi tiga komponen utama yaitu reduksi data (data reduction) sebagai proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, penyajian data (data display) dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis berupa kutipan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, serta data dokumentasi, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (drawing conclusions and verification) dengan merumuskan temuan dan makna dari data yang telah dianalisis serta mengaitkannya pada teori, konsep, dan konteks penelitian. Penelitian ini menggunakan konsep komunikasi persuasif dengan dimensi Ethos (kredibilitas komunikator) yang meliputi indikator integritas, kompetensi, keandalan, dan keteladanan; dimensi Pathos (daya tarik emosional) yang meliputi indikator bahasa yang ramah dan sopan, empati sosial, kedekatan psikologis, dan pendekatan kultural; serta dimensi Logos (daya tarik logis dan argumentatif) yang meliputi indikator kejelasan informasi, argumentasi rasional, bukti nyata, konsistensi pesan, dan relevansi bukti (Higgins & Walker, 2012). Penelitian ini juga dibantu menggunakan perangkat lunak NVivo untuk membantu peneliti dalam mengelola dan menganalisis data kualitatif secara lebih teratur, terutama dalam proses penyimpanan, pengelompokan, dan pemberian kode pada data wawancara maupun dokumen. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada komunikasi persuasif dalam mengatasi pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kawasan lokasi penelitian, serta dilaksanakan berdasarkan Kalender Akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun Akademik 2025/2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menyajikan hasil analisis dan pembahasan mengenai komunikasi persuasif Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Gowa dalam mengatasi pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam

dengan lima informan, observasi lapangan, serta dokumentasi yang kemudian diolah menggunakan model analisis interaktif. Pembahasan menggunakan kerangka teori komunikasi persuasif Onong Uchjana Effendy yang dikombinasikan dengan pendekatan retorika Aristoteles, yaitu Ethos (kredibilitas komunikator), Pathos (daya tarik emosional), dan Logos (daya tarik logis dan argumentatif) sebagai dimensi analisis utama.

Sebagai gambaran awal, Tabel 1 berikut menyajikan ringkasan komprehensif temuan penelitian, faktor penghambat, dan upaya yang dilakukan Satpol PP berdasarkan ketiga dimensi komunikasi persuasif tersebut. Penjelasan lebih mendalam mengenai masing-masing dimensi diuraikan pada subbab selanjutnya.

Tabel 1.
Ringkasan Hasil dan Pembahasan Komunikasi Persuasif Satpol PP Kabupaten Gowa dalam Penegakan Kebijakan KTR

No.	Dimensi	Temuan/Hasil Penelitian	Faktor Penghambat	Upaya Mengatasi Hambatan
1	Ethos (Kredibilitas Komunikator) 41,9%	• Integritas: penegakan KTR berdasarkan hukum yang jelas. • Kompetensi: aparat dibekali pemahaman Perda KTR. • Keandalan: patroli dan pengawasan konsisten. • Keteladanan: aparat menjadi contoh kepatuhan KTR.	• Personel terbatas vs. wilayah luas. • Keteladanan di kantor sendiri belum konsisten. • Belum ada pelatihan komunikasi persuasif terstruktur.	• Pembinaan internal berkala. • Evaluasi rutin oleh pimpinan. • Penguatan kapasitas aparat berkelanjutan.
2	Pathos (Daya Tarik Emosional) 32,3%	• Bahasa ramah & sopan saat menegur. • Empati sosial terhadap situasi masyarakat. • Komunikasi kekeluargaan dan santai. • Penggunaan bahasa daerah (Bugis-Makassar).	• Citra represif Satpol PP di masa lalu. • Resistensi awal dari masyarakat. • Perbedaan latar budaya & pendidikan.	• Mengubah citra menjadi humanis. • Memberi ruang dialog sebelum penertiban. • Penyesuaian komunikasi dengan budaya lokal.
3	Logos (Daya Tarik Logis) 25,8%	• Penjelasan aturan dengan bahasa sederhana. • Argumentasi dampak kesehatan rokok. • Papan larangan merokok dan patroli	• 5 dari 8 papan KTR di RSUD Syekh Yusuf rusak. • 84% pelanggar tidak tahu berada di zona KTR. • Kesenjangan	• Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan. • Perbaikan papan KTR dan spanduk. • Pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi.

	rutin. • Pesan konsisten melalui SOP internal.	perencanaan dan realisasi program.

Sumber: Hasil Pengolahan Data

3.1. Komunikasi Persuasif Berdasarkan Ethos, Pathos, dan Logos

Penulis melakukan pengukuran terhadap komunikasi persuasif yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Gowa dalam penegakan kebijakan KTR melalui tiga dimensi utama, yaitu Ethos (kredibilitas komunikator), Pathos (daya tarik emosional), dan Logos (daya tarik logis dan argumentatif). Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan lima informan yang terdiri dari Kepala Satpol PP, Kepala Bidang Trantibum, anggota Satpol PP, perwakilan Dinas Kesehatan, dan masyarakat/pelanggar KTR, diperoleh temuan bahwa strategi komunikasi persuasif Satpol PP bersifat Ethos-Centric dengan dominasi sebesar 41,9% dari total segmen data. Pada dimensi Ethos, subdimensi integritas dan kompetensi masing-masing memiliki 4 segmen dengan tingkat kepadatan narasi tertinggi (rata-rata 29,5 kata dan 18,2 kata per jawaban) serta melibatkan informan yang luas dari tingkat pimpinan hingga masyarakat, yang membuktikan bahwa penerimaan masyarakat sangat bergantung pada kejujuran dan profesionalisme aparat di lapangan. Kepala Satpol PP Kabupaten Gowa menegaskan bahwa setiap tindakan penegakan KTR harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta aparat diingatkan untuk tidak bersikap diskriminatif dan menghindari penyalahgunaan wewenang karena kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada integritas tersebut. Hal ini diperkuat oleh masyarakat/pelanggar KTR yang menilai bahwa aparat Satpol PP menegur dengan sopan dan tidak memaksa sehingga menimbulkan kesan bahwa penegakan KTR dilakukan secara adil dan beretika. Dari sisi kompetensi, aparat dibekali pemahaman mengenai Peraturan Daerah tentang KTR sebelum turun ke lapangan agar mampu menjelaskan aturan secara tepat kepada masyarakat, serta dituntut untuk menjelaskan aturan dengan bahasa yang mudah dipahami supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Keandalan aparat diwujudkan melalui konsistensi pengawasan dan kehadiran rutin di lapangan, meskipun personel terbatas, aparat tetap berusaha melakukan patroli dan memberikan teguran kepada pelanggar KTR. Keteladanan aparat juga menjadi bagian penting, di mana aparat harus mampu menjadi contoh terlebih dahulu dalam mematuhi aturan KTR agar masyarakat juga mau mengikuti, meskipun berdasarkan observasi peneliti, keteladanan dalam bentuk pengawasan aktif di lingkungan kantor sendiri masih perlu diperkuat.

Pada dimensi Pathos (daya tarik emosional) yang menyumbang porsi 32,3% dari total segmen, penulis menemukan bahwa Satpol PP menggunakan bahasa yang ramah dan sopan, empati sosial, kedekatan psikologis, serta pendekatan kultural dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Kepala Satpol PP menyampaikan bahwa aparat diarahkan untuk menggunakan bahasa yang santun dan tidak memancing konflik ketika menegur masyarakat yang melanggar aturan KTR. Masyarakat/pelanggar KTR menilai bahwa aparat memberikan teguran dengan cara yang baik dan tidak kasar, sehingga masyarakat tidak merasa dimarahi. Dalam hal empati sosial, aparat selalu diingatkan untuk memahami situasi masyarakat terlebih dahulu supaya pendekatan yang dilakukan lebih humanis, dan aparat berusaha menyesuaikan cara komunikasi dengan kondisi masyarakat di lapangan agar masyarakat tidak tersinggung. Kedekatan psikologis dibangun melalui komunikasi yang bersifat kekeluargaan, di mana aparat biasanya berbicara secara santai dan kekeluargaan supaya

masyarakat tidak merasa ditekan. Pendekatan kultural juga dilakukan dengan menyesuaikan cara komunikasi terhadap nilai sosial dan budaya masyarakat setempat, termasuk penggunaan bahasa daerah agar komunikasi terasa lebih dekat dan masyarakat tidak merasa berjarak. Keterlibatan masyarakat di hampir seluruh subdimensi Pathos mengonfirmasi bahwa pendekatan emosional yang dilakukan aparat benar-benar dirasakan oleh pihak eksternal, bukan sekadar klaim sepihak dari Satpol PP.

Pada dimensi Logos (daya tarik logis dan argumentatif) yang menyumbang porsi 25,8% dari total segmen, Satpol PP menekankan pada kejelasan informasi, argumentasi rasional, bukti nyata, konsistensi pesan, dan relevansi bukti. Kepala Satpol PP menyampaikan bahwa aparat diarahkan untuk menjelaskan aturan KTR dengan bahasa yang sederhana supaya masyarakat memahami isi kebijakan tersebut, serta tidak hanya melarang tetapi juga menjelaskan dampak kesehatan akibat asap rokok agar masyarakat memahami alasan aturan KTR diterapkan. Kehadiran Dinas Kesehatan dalam sosialisasi memberikan validitas bahwa argumentasi medis digunakan secara rasional oleh Satpol PP untuk meyakinkan pelanggar. Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa pihaknya mendukung Satpol PP dengan data dampak rokok terhadap kesehatan agar masyarakat memahami alasan KTR. Dalam hal bukti nyata, pemasangan papan larangan merokok dan patroli rutin menjadi bentuk penerapan aturan KTR di lapangan, meskipun berdasarkan observasi peneliti di RSUD Syekh Yusuf Gowa, lima dari delapan papan peringatan KTR dalam kondisi rusak sehingga pesan tidak tersampaikan secara optimal. Konsistensi pesan dijaga melalui standar operasional prosedur dan koordinasi internal yang berkelanjutan, di mana seluruh aparat dibekali pemahaman yang sama mengenai substansi kebijakan KTR dan cara penyampaiannya agar saat turun ke lapangan tidak ada perbedaan pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Relevansi bukti diwujudkan dengan menjelaskan bahwa aturan KTR dibuat untuk melindungi masyarakat terutama di tempat pelayanan publik dan fasilitas umum, sehingga pesan yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

3.2. Faktor Penghambat Komunikasi Persuasif

Penulis juga menemukan sejumlah faktor penghambat dalam pelaksanaan komunikasi persuasif oleh Satpol PP Kabupaten Gowa, yang terdiri dari faktor internal, faktor eksternal, serta citra dan persepsi publik. Berdasarkan analisis data, faktor internal dan eksternal memiliki pengaruh yang seimbang terhadap keberhasilan komunikasi persuasif. Secara internal, keterbatasan anggaran operasional menjadi salah satu kendala utama yang berdampak pada intensitas kegiatan sosialisasi, pengawasan, serta pembinaan aparatur. Kepala Satpol PP mengungkapkan bahwa anggaran yang dimiliki terbatas sementara tugas Satpol PP cukup banyak, sehingga berpengaruh pada kegiatan sosialisasi dan pengawasan KTR yang belum bisa dilakukan secara maksimal. Selain keterbatasan anggaran, jumlah personel yang tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan juga menjadi hambatan internal, di mana jumlah personel masih terbatas sementara wilayah yang harus diawasi cukup luas, sehingga penertiban KTR belum bisa dilakukan secara intensif di semua tempat. Faktor internal lainnya adalah belum adanya pelatihan komunikasi persuasif yang terstruktur dan berkelanjutan bagi aparat Satpol PP, di mana pembekalan khusus tentang teknik komunikasi persuasif dengan masyarakat masih jarang dilakukan sehingga kemampuan komunikasi sangat bergantung pada pengalaman individu masing-masing.

Pada faktor eksternal, penulis menemukan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat kebijakan KTR menjadi tantangan tersendiri bagi aparat di lapangan. Kepala Dinas Kesehatan menilai bahwa sebagian masyarakat belum memahami bahwa KTR ini untuk melindungi kesehatan bersama, bukan sekadar melarang merokok. Berdasarkan observasi peneliti di Terminal Pallangga, Kantor Camat, dan Halaman Masjid Raya, dari 45 orang yang merokok di area tersebut, sebanyak 38 orang atau 84% sama sekali tidak menyadari bahwa mereka berada di zona KTR karena tidak ada petugas yang berjaga dan rambu larangan tidak terlihat. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar pelanggaran terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena ketiadaan pengingat visual yang memadai. Selain itu, persepsi negatif masyarakat terhadap Satpol PP di masa lalu juga menjadi hambatan dalam proses komunikasi persuasif, di mana citra Satpol PP yang kerap diasosiasikan dengan pendekatan represif menyebabkan sebagian masyarakat bersikap defensif atau menolak saat dilakukan peneguran. Masyarakat/pelanggar KTR mengungkapkan bahwa dulu Satpol PP dikenal tegas, jadi awalnya ia agak takut meskipun sekarang caranya sudah lebih baik. Faktor citra dan persepsi publik ini menunjukkan bahwa residu persepsi masa lalu yang menganggap Satpol PP sebagai aparat represif masih menjadi tantangan nyata dalam membangun kepercayaan masyarakat

3.3. Upaya Mengatasi Hambatan Komunikasi Persuasif

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Satpol PP Kabupaten Gowa melakukan sejumlah upaya strategis yang diarahkan pada penguatan kapasitas internal organisasi sekaligus peningkatan kualitas interaksi dengan masyarakat. Berdasarkan analisis data, upaya utama yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas aparat, komunikasi dan sosialisasi, pendekatan humanis dan persuasif, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Prioritas utama bertumpu pada peningkatan kapasitas aparat dan komunikasi dan sosialisasi, yang menunjukkan bahwa instansi memandang solusi sebagai kombinasi antara pembenahan pembinaan kualitas petugas di hulu dan sosialisasi kepada masyarakat di hilir. Kepala Satpol PP menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan pembinaan internal agar anggota memahami bahwa penegakan KTR tidak cukup hanya dengan tindakan, tetapi juga dengan komunikasi yang baik dan persuasif. Pembinaan ini dilakukan melalui arahan pimpinan, evaluasi rutin, serta penekanan pada pentingnya komunikasi yang santun dan persuasif dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Selain pembinaan internal, Satpol PP juga memperkuat pendekatan humanis dalam berinteraksi dengan masyarakat yang diwujudkan melalui penggunaan bahasa yang ramah, sikap empatik, serta pemberian ruang dialog kepada masyarakat sebelum dilakukan tindakan penertiban. Kepala Bidang Trantibum menegaskan bahwa pihaknya ingin mengubah citra Satpol PP yang dulu terkesan tegas menjadi lebih humanis, sehingga masyarakat tidak langsung menolak ketika ditegur. Upaya lainnya adalah penguatan kerja sama lintas sektor, khususnya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi kebijakan KTR. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat aspek argumentasi rasional (Logos) melalui penyampaian data dan informasi kesehatan yang valid dan mudah dipahami masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan Satpol PP untuk memberikan edukasi berbasis data kesehatan agar masyarakat memahami bahwa KTR ini untuk kepentingan bersama. Melalui kerja sama lintas sektor tersebut, pesan kebijakan KTR tidak hanya disampaikan sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam melindungi kesehatan publik. Masyarakat mengungkapkan bahwa penjelasan yang melibatkan aspek kesehatan membuat mereka lebih memahami dan menerima kebijakan KTR.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan komunikasi persuasif oleh Satpol PP Kabupaten Gowa dalam penegakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kepatuhan masyarakat. Penulis menemukan temuan penting bahwa strategi komunikasi persuasif yang mengintegrasikan ketiga dimensi Ethos, Pathos, dan Logos secara seimbang terbukti efektif dalam mengatasi pelanggaran KTR, di mana pendekatan humanis yang diterapkan aparat berhasil mengurangi resistensi masyarakat dan menciptakan kepatuhan sukarela. Sama halnya dengan temuan Karman (2025) yang menyatakan bahwa komunikasi persuasif Satpol PP cukup efektif menurunkan pelanggaran KTR, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa pendekatan persuasif lebih efektif dibandingkan pendekatan represif dalam konteks kebijakan yang bersinggungan langsung dengan kebiasaan sosial masyarakat. Penulis juga menemukan bahwa keberhasilan komunikasi persuasif sangat bergantung pada integritas dan kompetensi aparat sebagai komunikator, yang sejalan dengan temuan Husain and Tjenreng (2023) bahwa implementasi Perda KTR masih terkendala pada aspek komunikasi dan sumber daya manusia. Lebih jauh, Chen et al. (2024) membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah berkorelasi positif dengan kepatuhan terhadap kebijakan publik, sehingga membangun kredibilitas aparat (ethos) sebagaimana yang diterapkan Satpol PP Kabupaten Gowa merupakan investasi strategis jangka panjang dalam penegakan kebijakan KTR secara sukarela. Berbeda dengan penelitian Bahrun (2023) yang menemukan bahwa implementasi KTR di Kota Makassar masih terbatas pada sosialisasi tanpa sanksi tegas, penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Gowa telah mengombinasikan pendekatan persuasif dengan penegakan aturan secara humanis, sehingga masyarakat tidak hanya patuh karena takut sanksi tetapi juga karena kesadaran akan pentingnya kesehatan bersama. Sementara itu, temuan Nurochmah and Ma'ruf (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada konsistensi komunikasi dan keterlibatan masyarakat juga diperkuat oleh penelitian ini, di mana konsistensi pesan dan keterlibatan lintas sektor dengan Dinas Kesehatan menjadi faktor pendukung utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan KTR di Kabupaten Gowa.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis juga menemukan beberapa temuan menarik lainnya yang tidak terdapat pada penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, meskipun komunikasi persuasif telah dilakukan dengan baik oleh aparat di lapangan, keberadaan sarana fisik pendukung seperti papan peringatan KTR yang rusak dan tidak terawat justru melemahkan efektivitas pesan yang disampaikan secara lisan. Observasi peneliti di RSUD Syekh Yusuf Gowa membuktikan bahwa lima dari delapan papan peringatan KTR dalam kondisi rusak sehingga pesan tidak tersampaikan secara visual kepada masyarakat. Kedua, terjadi kesenjangan antara perencanaan program dan realisasi di lapangan, di mana Berita Acara Rapat Koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Kesehatan telah merencanakan pembuatan 50 unit spanduk baru dan jadwal operasi yustisi bersama, namun hingga observasi lanjutan dilakukan, spanduk baru belum terpasang. Ketiga, berdasarkan observasi di Kantor Satpol PP sendiri, peneliti belum menemukan adanya pengawasan aktif maupun keteladanan yang dilakukan secara konsisten oleh aparat di lingkungan kantor, yang menunjukkan bahwa implementasi KTR tidak hanya membutuhkan aturan tertulis tetapi juga memerlukan contoh nyata dari aparat sebagai pelaksana kebijakan. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas komunikasi persuasif tidak hanya ditentukan oleh faktor manusia (aparat dan masyarakat), tetapi

juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana pendukung serta konsistensi implementasi di internal organisasi pelaksana kebijakan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa komunikasi persuasif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa dalam mengatasi pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah dilaksanakan dengan mengubah pola penegakan dari represif menjadi persuasif-edukatif, di mana berdasarkan teori retorika Aristoteles, pendekatan yang digunakan didominasi oleh kekuatan Ethos yang meliputi integritas, profesionalisme, dan keteladanan pimpinan, yang kemudian didukung oleh Pathos melalui penggunaan bahasa daerah yang santun dan empati sosial untuk meredam resistensi masyarakat, serta Logos berupa penyampaian argumentasi rasional yang jelas berbasis perlindungan kesehatan masyarakat.

Penulis juga menemukan bahwa pelaksanaan komunikasi persuasif tersebut masih menghadapi hambatan yang bersifat simetris antara kendala internal dan eksternal, di mana faktor internal meliputi keterbatasan anggaran operasional, keterbatasan jumlah personel, serta belum adanya pelatihan komunikasi persuasif yang terstandarisasi bagi aparat di lapangan, sementara faktor eksternal dipengaruhi oleh rendahnya literasi kesehatan masyarakat terhadap batas-batas area KTR serta adanya persepsi masyarakat atau residu citra masa lalu yang masih menganggap Satpol PP sebagai aparat yang represif. Guna mengatasi berbagai hambatan tersebut, Satpol PP Kabupaten Gowa menerapkan strategi yang holistik meliputi peningkatan kapasitas internal aparat melalui pembinaan berkelanjutan dan arahan keteladanan dari pimpinan, penguatan pendekatan humanis dan kultural dalam setiap penertiban, serta kolaborasi lintas sektor yang kuat khususnya menggandeng Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa guna memberikan edukasi berbasis data dampak penyakit rokok agar argumentasi medis (Logos) dapat diterima oleh masyarakat secara sukarela.

Keterbatasan penelitian ini adalah waktu dan biaya penelitian yang terbatas, serta penelitian hanya dilakukan pada satu kabupaten saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu. Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan efektivitas komunikasi persuasif dalam penegakan kebijakan publik lainnya di Kabupaten Gowa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam, serta disarankan bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dalam sosialisasi KTR, melakukan perbaikan sarana dan prasarana pendukung seperti papan peringatan KTR yang lebih memadai, serta memberikan pelatihan komunikasi persuasif yang terstruktur dan berkelanjutan bagi seluruh aparat Satpol PP di lapangan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa beserta jajarannya, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Gowa, seluruh anggota Satpol PP yang bertugas di lapangan, serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan informasi yang berharga bagi penulis untuk melaksanakan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat dan pelanggar Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kelurahan Parang Banoa dan Desa Taeng, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, yang telah bersedia menjadi informan dan berpartisipasi aktif dalam proses pengumpulan data. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada para dosen pembimbing dan penguji, keluarga, serta seluruh pihak yang telah membantu dan

mensukseskan pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini, semoga segala bantuan dan kebaikan yang diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Bahrun, A. A. (2023). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14040

Cahya, P. (2022). *Strategi Komunikasi Persuasif Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Semarang* Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/9063

Chen, G., Zhang, H., Hu, Y., & Luo, C. (2024). Trust as a catalyst: revealing the impact of government trust and professional trust on public health policy compliance during a pandemic. *BMC Public Health*, *24*(1), 957. https://doi.org/ https://doi.org/10.1186/s12889-024-18449-2

Chowdhury, S. R., Sunna, T. C., Das, D. C., Chowdhury, M. R., Mahmud, H. M., & Hossain, A. (2023). Compliance with smoke-free legislation in public places: An observational study in a northeast city of Bangladesh. *PLoS One*, *18*(4), e0283650. https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283650

Creswell, J., Poth, C. N., & Rawlins, P. (2023). Mapping design trends and evolving directions using the Sage handbook of mixed methods research design. 527-537. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/15586898221110375

Effendy, O. U. (1990). *Ilmu komunikasi teori dan praktek*. Remaja Rosdakarya. https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:02656ab1-8b2c-4e56-9bcd-024716cd505d

Higgins, C., & Walker, R. (2012). Ethos, logos, pathos: Strategies of persuasion in social/environmental reports. *Accounting forum*, *36*(3), 194-208. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.accfor.2012.02.003

Hoe, C., Ahsan, H., Ning, X., Wang, X., Li, D., Wright, K., & Kennedy, R. D. (2021). Enforcement agencies and smoke-free policy compliance: An observational study in Qingdao, China. *Tobacco Induced Diseases*, *19*, 26. https://doi.org/https://doi.org/10.18332/tid/133635

Husain, Z., & Tjenreng, D. M. B. Z. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14727

Ismaniar, N. I., & Rahman, I. (2024). Profile of Male Smoking in Rural: Descriptive Study of Timbuseng, Gowa Regency. *Miracle Journal of Public Health*, *7*(1), 38-45. https://doi.org/https://doi.org/10.36566/mjph.v7i1.361

Karman, H. (2025). *KOMUNIKASI PERSUASIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENGATASI PELANGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN TAKALAR PROVINSI SULAWESI SELATAN* INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI]. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20244

Madjid, U. (2023). Pengantar llmu Administrasi. https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:ddf04ca5-3f8d-482d-9720-7b293ac1c879

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. sage. https://surl.li/ecmqoy

Nurochmah, A. D., & Ma'ruf, M. m. (2025). *STRATEGI PENEGAKAN KAWASAN TANPA ROKOK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT* Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22650

Supriatna, D., Madjid, U., & Ismail, I. (2025). Sistem Pemerintahan Indonesia. https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:8a3a4517-78d5-4f6b-9c8a-2f4b222b81d8

Yunarman, S., Zarkani, A., Walid, A., Ahsan, A., & Kusuma, D. (2020). Compliance with smoke-free policy and challenges in implementation: evidence from Bengkulu, Indonesia. *Asian Pacific journal of cancer prevention: APJCP*, *21*(9), 2647. https://doi.org/https://doi.org/10.31557/APJCP.2020.21.9.2647